

STRATEGI UNTUK KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN SEMARAPURA

Dewa Putu Aris Sadana¹, Nyoman Utari Vipriyanti², I Putu Sujana³,
I Ketut Widnyana⁴

^{1,2,3,4} Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan, Program Pascasarjana,
Universitas Mahasaraswati Denpasar

¹ Email : arissdn1994@gmail.com

Diterima (received): 01 Agustus 2019

Disetujui (accepted): 05 Oktober 2019

ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya RTH Publik memiliki peran penting dalam mewujudkan suatu perkotaan yang berkelanjutan. Hingga saat ini belum ada kajian mengenai strategi untuk ketersediaan RTH Publik di Kawasan Perkotaan Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun strategi untuk ketersediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah survey data instansi, kuisisioner dan Focus Group Discussion (FGD). Teknik analisis data pada penelitian ini adalah Teknik Analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat (SWOT) dan Analithical Hierarchy Process (AHP). Selanjutnya, telah tersusun 8 (delapan) strategi untuk ketersediaan RTH Publik di Kawasan Perkotaan Semarang. Strategi yang menjadi prioritas utama adalah Pemetaan lahan potensial seperti aset-aset milik pemerintah sebagai alternatif penyediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang.

Kata Kunci : strategi, ketersediaan, RTH

A. PENDAHULUAN

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya RTH Publik di kawasan perkotaan merupakan isu dunia yang tercermin pada Sustainable Development Goals (SDG's) ke-11 menyebutkan "make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sutainable". Selanjutnya, SDG's ke-13 menyebutkan "Take urgent action to combat climate change and its impact". Selanjutnya, RTH dalam suatu kawasan perkotaan memiliki peran yang cukup penting bagi kehidupan perkotaan, salah satunya adalah sebagai paru-paru kawasan. Hilangnya ruang terbuka hijau di daerah perkotaan, menyebabkan ketidakstabilan psikologis dan emosional sehingga ruang gerak masyarakat untuk beraktivitas dan berpikir menjadi semakin terbatas (Budiharjo, 1999 dalam Alfiah, 2008).

Selaras dengan amanat Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, perlu diwujudkan suatu bentuk pengembangan kawasan perkotaan yang mengharmonisasikan lingkungan alamiah dan lingkungan buatan yang salah satunya melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari total luas wilayah (Indonesia, 2007). Ketersediaan minimal 30% RTH dapat dijadikan ukuran untuk menjamin keberlangsungan keseimbangan ekosistem kota (Hakim, 2004 dalam Dharmadiatmika, 2017). *Indicator of Green Space Aviability*

menyebutkan bahwa minimal tersedianya 2 (dua) hektar RTH dalam wilayah yang berdiameter 300 (tiga ratus) meter (Handley, dkk, 2003 dalam Xu, dkk, 2018). Jadi, ketersediaan RTH dengan rasio 30% dapat menjadi ukuran minimal penyediaan RTH dalam suatu wilayah .

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029, mengarahkan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) memiliki minimal rasio 20% untuk RTH Publik dan 10% untuk RTH privat (Bali, 2009). RTH Privat adalah RTH yang dimiliki dan dikelola secara perseorangan atau dapat dikatakan sebagai RTH pribadi. Sedangkan, RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah/ instansi pemerintahan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum (Dirjentar, 2008). Substansi dari penelitian ini fokus pada RTH Publik, karena secara sistem kepemilikan dan pengelolannya merupakan kewenangan pemerintah sehingga lebih mudah untuk diintervensi.

Lokus dari penelitian ini adalah Kawasan Perkotaan Semarang yang merupakan pusat kota dan pusat pemerintahan dari Kabupaten Klungkung. Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten yang unik di Bali, karena selain memiliki sejarah yaitu pernah menjadi pusat kerajaan di Bali, Kabupaten Klungkung juga merupakan satu-satunya kabupaten di Bali yang memiliki bentuk wilayah administrasi yang terpisahkan oleh laut. Sebagian besar Wilayah Administrasi Kabupaten Klungkung berada di Kepulauan Nusa Penida (Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, dan Pulau Nusa Lembongan) dan sebagian lagi berada di daratan Pulau Bali. Kawasan Perkotaan Semarang yang menjadi lokus penelitian ini terdiri dari 6 (enam) Wilayah Kelurahan yaitu Kelurahan Semarang Kaja, Kelurahan Semarang Kangin, Kelurahan Semarang Kauh, Kelurahan Semarang Kelod, Kelurahan Semarang Kelod Kangin, dan Kelurahan Semarang Tengah. Total luas wilayah Kawasan Perkotaan Semarang adalah 535 hektar.

Jumlah penduduk di Kawasan Perkotaan Semarang semakin meningkat. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kawasan Perkotaan Semarang berdasarkan data BPS Kecamatan Klungkung Dalam Angka Tahun 2012-2016 adalah 0,31 setiap tahunnya (BPS, 2016). Meningkatnya jumlah penduduk dapat mempengaruhi ketersediaan ruang publik, karena dimanfaatkan sebagai penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas perkotaan (Asoka, 2013). Kecenderungan terjadinya penurunan kuantitas ruang publik yang sangat signifikan, terutama Ruang Terbuka Hijau, pada 30 (tiga puluh) tahun terakhir ini di Kawasan Perkotaan (Yunus, 2008). RTH yang ada di kawasan perkotaan sebagian besar telah dikonversi infrastruktur perkotaan seperti jaringan jalan, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan kawasan permukiman baru (Siahaan, 2010). Dominasi pemanfaatan lahan sebagai lahan terbangun di Kawasan Perkotaan Semarang ditunjukkan berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klungkung, dimana kawasan terbangun memiliki luasan mencapai 306,14 hektar atau 57,22% dari total luas wilayah Kawasan Perkotaan Semarang. Sedangkan lahan tidak terbangun memiliki luas 228,86 hektar atau 42,78% dari total luas wilayah Kawasan Perkotaan Semarang.

Sedangkan, Kajian RTH Publik di Kawasan Perkotaan Semarang, hingga saat ini belum dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi untuk ketersediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang. Penyusunan strategi untuk ketersediaan RTH Publik dilakukan sebagai upaya antisipatif awal dalam merencanakan RTH Publik di Kawasan Perkotaan Semarang. Kajian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah/ Instansi terkait, sebagai acuan/ referensi dalam penyusunan kebijakan mengenai RTH, khususnya RTH Publik di Kawasan Perkotaan Semarang.

B. METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kawasan Perkotaan Semarang yang terdiri dari 6 (enam) desa/kelurahan yaitu Kelurahan Semarang Kaja, Kelurahan Semarang Tengah, Kelurahan Semarang Kangin, Kelurahan Semarang Kelod, Kelurahan Semarang Kelod Kangin, dan Kelurahan Semarang Kauh. Penelitian ini dilakukan dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.

2. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel yang digunakan untuk perumusan strategi penyediaan RTH Publik di Kawasan Perkotaan Semarang adalah stakeholder sebagai partisipan dalam kegiatan FGD dan sampel sebagai responden untuk menjawab kuisioner dalam analisis SWOT. Sampel untuk penelitian ini diambil secara purposive sampling. Purposive sampling adalah suatu teknik penentuan/pengambilan jumlah sampel dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan (Sugiyono, 2016). Kriteria responden yang akan dijadikan sampel yaitu: 1) merupakan Pemangku Kebijakan (pemerintah/ instansi) terkait Ketersediaan RTH Publik di Perkotaan Semarang; dan 2) memiliki wawasan/bidang yang terkait dengan Ketersediaan RTH Publik di Perkotaan Semarang. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sebanyak 17 (tujuh belas) sampel.

3. Variabel Operasional

Variabel perumusan strategi untuk ketersediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang meliputi faktor lingkungan, Sumber Daya Manusia (SDM) perencana, arahan kebijakan, perkembangan ilmu dan teknologi, dan pendanaan. Indikator dari variabel tersebut disusun berdasarkan faktor keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan pembangunan (Riyadi, dkk, 2004), meliputi:

- a. Faktor lingkungan berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) dimana unsur-unsur yang terkandung di dalamnya adalah sosial, budaya, ekonomi dan politik.
- b. Faktor kualitas pengetahuan SDM penggerak perencanaan dimana unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh perencana adalah perencanaan SDA, perencanaan sosial ekonomi, perencanaan fisik dan infrastruktur.
- c. Faktor sistem yang digunakan adalah aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh suatu wilayah dimana unsur-unsur yang terkandung di dalamnya adalah prosedur, mekanisme pelaksanaan, pengembalian keputusan, dan pengesahan.

- d. Faktor ilmu dan teknologi bukan hanya dalam hal alat berteknologi melainkan suatu metode/ model baru dalam perencanaan pengembangan suatu wilayah.
- e. Faktor pendanaan pada dasarnya merupakan yang sudah given.

4. Kebutuhan Data

Berdasarkan variabel operasional penelitian di atas kemudian disusun kebutuhan data yang berfungsi sebagai input/masukkan penelitian. Tabel kebutuhan data ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan Data Penelitian

Kebutuhan Data	Sumber	Teknik Pengumpulan
Data Tupoksi SKPD yang berkepentingan terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Pekotaan Semarang	BAPPEDA Kabupaten Klungkung	Survei data instansi
Faktor internal (IFE) dan eksternal (EFE) tentang penyediaan RTH Publik di Perkotaan Semarang	Lapangan dan literatur	Observasi lapangan dan studi literatur
Isian Kuisisioner IFE EFE	Responden	Kuisisioner IFE EFE
Isian Matriks SWOT	Partisipan/ Informan	Kegiatan FGD
Isian Prioritas Strategi Penyediaan RTH Publik Perkotaan Semarang	Para pakar (Stakeholder dari instansi)	Kuisisioner AHP

Sumber: Peneliti, 2018

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri atas dua jenis yakni teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini diantaranya:

- a. *Foccus Group Discussion* (FGD), teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh respon dari stakeholder terkait strategi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Semarang. Dalam pelaksanaan FGD, diperlukan instrument berupa daftar pertanyaan dan Peta Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Perkotaan Semarang.
- b. Kuesioner AHP, kuesioner ini ditujukan kepada narasumber ahli untuk mengetahui tingkat prioritas strategi penyediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang. Kuesioner AHP ini menggunakan tabel matriks AHP dan tabel kuesioner yang disesuaikan dengan variabel kesiapan pengembangan kawasan. Adapun pemilihan narasumber ahli harus memenuhi kriteria tertentu meliputi, masih aktif bekerja dalam institusi yang ikut serta dalam penyediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang.

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik

pengumpulan data yang telah tersedia di lembaga atau instansi yang terkait dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik analisis yaitu teknik analisis SWOT untuk menyusun strategi untuk ketersediaan RTH Publik di Kawasan Perkotaan Semarang dan teknik analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menganalisis tingkat prioritas strategi. Berikut merupakan penjabaran tahapan dari masing-masing pelaksanaan teknik analisis pada penelitian ini.

a. Analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* (SWOT) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut (Rangkuti, 2000):

1. Menyusun matrik faktor Internal dan eksternal berdasarkan variabel operasional dan indikator penelitian;
2. Memberikan skor melalui penyebaran kuisioner dan menghitung nilai faktor internal (IFE) dan nilai faktor eksternal (EFE);
3. Menentukan posisi kuadran untuk mengetahui status pengembangan kawasan; dan
4. Merumuskan strategi melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan instrumen matrik SWOT.

b. Analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui urutan tingkat kepentingan tersebut adalah dengan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang bertujuan untuk mengetahui prioritas yang dimiliki masing-masing variabel berdasarkan urutan tingkat kepentingannya. Berikut merupakan prosedur yang digunakan dalam teknik AHP (Saaty, 2008):

1. Menyusun hirarki dan permasalahan yang dihadapi;
2. Menentukan tingkat kepentingan kriteria dengan kuisioner matriks perbandingan berpasangan;
3. Sintesis dilakukan melalui penyatuan pendapat ahli melalui kuisioner matrik perbandingan berpasangan, mengukur nilai *Consistency Ratio* (CR). *Nilai Consistency Ratio* (CR) yang dapat diterima yaitu $<0,1$; dan
4. Menentukan tingkat prioritas melalui beberapa literasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum

Kawasan Perkotaan Semarang merupakan salah satu kawasan perkotaan yang berada di Kabupaten Klungkung. Permukaan tanah di Kabupaten Klungkung umumnya tidak rata, bergelombang bahkan sebagian besar berupa bukit-bukit terjal yang kering dan tandus dan sebagian kecil saja merupakan dataran rendah. Jenis tanah di Kawasan Perkotaan Semarang terdiri dari dua jenis tanah yaitu jenis tanah Regosol Coklat Kekuningan dan jenis tanah Regosol Kelabu. Curah hujan di Kabupaten Klungkung khususnya Kawasan Perkotaan Semarang, memiliki curah hujan rata-rata 0-200mm/bulan dengan temperatur udara berkisar antara 27 °C–30,9 °C.

Kawasan perkotaan Semarang memiliki penggunaan lahan yang didominasi oleh permukiman dengan luas kurang lebih 191,17 Ha atau sekitar 35,73 persen dari total luas kawasan. Meskipun statusnya sebagai kawasan perkotaan namun

penggunaan lahan sebagai pertanian dan peternakan masih cukup luas yaitu kurang lebih 212,90 Ha atau sekitar 39,79 persen dari total luas wilayah. Sedangkan penggunaan lahan paling sedikit yaitu berupa fasilitas olahraga dan fasilitas sosial dimana masing-masing hanya seluas 0,08 Ha dan 0,43 Ha.

Namun, kepemilikan lahan di Kawasan Perkotaan Semarang masih didominasi oleh kepemilikan privat, namun dilain sisi kebutuhan perkotaan terhadap pembangunan infrastruktur perkotaan yang semakin bertambah tersebut menjadi ancaman terjadinya dilematis Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan lahan/aset publik Perkotaan, karena tidak sepenuhnya lahan atau aset pemerintah dapat dimanfaatkan sebagai RTH Publik, melalainkan juga untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur umum Kawasan Perkotaan. Hal tersebut akan menjadi ancaman terhadap ketersediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang. Maka, penyediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang sangat perlu perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

2. Strategi untuk Ketersediaan RTH Publik di Kawasan Perkotaan Semarang

Strategi untuk ketersediaan RTH Publik telah disusun melalui 2 (dua) tahap yaitu penentuan posisi kuadran penyediaan RTH Publik dan perumusan strategi untuk ketersediaan RTH Publik di Kawasan Perkotaan Semarang. Posisi kuadran dari penyediaan RTH Publik di Kawasan Perkotaan Semarang ditentukan berdasarkan nilai temu antara total nilai faktor internal (IFE) dan total nilai faktor eksternal (EFE). Berdasarkan hasil perhitungan faktor internal dan eksternal didapatkan bahwa total nilai faktor internal (kekuatan dan kelemahan) adalah 3,49 dan total nilai faktor eksternal (peluang dan ancaman) adalah 3,11.

Posisi kuadran penyediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang berada pada Sel I yaitu tumbuh dan bina (konsentrasi melalui integrasi vertikal). Jadi, penyediaan RTH Publik di Kawasan Perkotaan Semarang adalah optimis untuk dilakukan. Posisi kuadran dari penyediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang ditunjukkan pada Tabel 2.

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan faktor internal yaitu keterbatasan lahan Kawasan Perkotaan Semarang ditambah dengan lahan terbangun yang mendominasi dan kepemilikan lahan privat sangat tinggi. Sumber daya manusia, arahan kebijakan, teknologi, dan pendanaan secara umum berpotensi untuk mendukung penyediaan RTH Publik, namun perencanaan dan implementasi penyediaan RTH Publik belum optimal dilakukan. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi berdasarkan faktor eksternal yaitu terkait migrasi penduduk dari luar masuk kedalam Kawasan Perkotaan Semarang. Selanjutnya, adanya alih fungsi lahan pada lahan-lahan publik oleh pihak investor, menambah permasalahan akan menurunnya ruang sebagai penyediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang. Perlu adanya penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui arahan kebijakan penataan ruang di Kawasan Perkotaan Semarang.

Tabel 2. Posisi Kuadran Penyediaan RTH Publik di Kawasan Perkotaan Semarang

		<i>TOTAL NILAI IFE</i>		
		Kuat	Sedang	Lemah
		4,0	3,0	2,0
T O T A L N I L A I E F E	Kuat	I Tumbuh dan bina (konsentrasi melalui integrasi vertikal)	II Tumbuh dan bina (konsentrasi melalui integrasi horisontal)	III Pertahankan dan pelihara (pertumbuhan berputar)
	Sedang	IV Tumbuh dan bina (berhenti sejenak)	V Pertahankan dan pelihara (strategi tidak berubah)	VI Panen dan divestasi (kawasan habis atau jual habis kewaspadaan)
	Lemah	VII Pertahankan dan pelihara (diversifikasi konsentrasi)	VIII Panen atau divestasi (diversifikasi konglomerat)	IX Panen dan diversifikasi (likuidasi)
		3,0	2,0	1,0

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Strategi Penyediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang yang dirumuskan dengan analisis SWOT pada kegiatan FGD terdiri dari 8 (delapan) strategi. Strategi yang dirumuskan dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi yaitu Strategi S-O, Strategi W-O, Strategi S-T, dan Strategi W-T. Strategi S-O terdiri dari 3 (tiga) buah strategi yang telah dirumuskan yaitu 1) Pemetaan lahan potensial seperti aset-aset milik pemerintah sebagai alternatif penyediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang; 2) Pengadaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Desa/Kelurahan terkait penyediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang; 3) Pengadaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak swasta terkait penyediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang. Selanjutnya, Strategi W-O terdiri dari 3 (tiga) strategi yang telah dirumuskan yaitu 1) Pengoptimalan RTH Sempadan Sungai melalui pengadaan Taman dan konsep wisata sungai berbasis konservasi; 2) Pengoptimalan RTH Jalur Hijau Jalan melalui penghijauan di seluruh daerah RTH Jalur Hijau Jalan di Kawasan Perkotaan Semarang; 3) Mengadopsikan konsep Green City dan Tri Hita Karana kedalam RTRW Kabupaten Klungkung.

Strategi S-T terdiri dari 1 (satu) buah strategi yang telah dirumuskan yaitu Pemanfaatan lahan sawah sebagai Kawasan Lindung Jalur Hijau, dengan konsep wisata sawah organik. Selanjutnya, Strategi W-T terdiri dari 1 (satu) buah strategi yang telah dirumuskan yaitu Pengadaan arahan kebijakan Peraturan Daerah terkait

syarat minimal 30% penyediaan RTH Privat (telajakan, kebun, pekarangan terbuka) dalam sebuah kavling terbangun untuk meminimalisir dampak alih fungsi lahan terbangun. Proses dari perumusan 8 (delapan) buah strategi untuk ketersediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perumusan Strategi untuk Ketersediaan RTH Publik di Kawasan Perkotaan Semarang dengan Matrik SWOT

Internal Eksternal	Kekuatan (strengths); Faktor-faktor kekuatan	Kelemahan (weaknesses); Faktor-faktor kelemahan
Peluang (opportunities); Faktor-faktor peluang	<u>Strategi S-O :</u>	<u>Strategi W-O:</u>
	1. Pemetaan lahan potensial seperti aset-aset milik pemerintah sebagai alternatif penyediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang	5. Pengoptimalan RTH Sempadan Sungai melalui pengadaan Taman dan konsep wisata sungai berbasis konservasi
	2. Pengadaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Desa/Kelurahan terkait penyediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang	6. Pengoptimalan RTH Jalur Hijau Jalan melalui penghijauan di seluruh daerah RTH Jalur Hijau Jalan di Kawasan Perkotaan Semarang
	3. Pengadaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak swasta terkait penyediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang	7. Mengadopsikan konsep <i>Green City</i> dan THK kedalam RTRW Kab. Klungkung
Ancaman (threat); Faktor-faktor ancaman	<u>Strategi S-T:</u>	<u>Strategi W-T:</u>
	4. Pemanfaatan lahan sawah sebagai Kawasan Lindung Jalur Hijau, dengan konsep wisata sawah organik.	8. Pengadaan arahan kebijakan Peraturan Daerah terkait syarat minimal 30% penyediaan RTH Privat (telajakan, kebun, pekarangan terbuka) dalam sebuah kavling terbangun untuk meminimalisir dampak alih fungsi lahan terbangun.

Sumber: Hasil Analisis, 2018

3. Prioritisasi Strategi Penyediaan RTH Publik di Kawasan Perkotaan Semarang

Prioritisasi strategi dilakukan untuk menyusun skenario pelaksanaan strategi untuk ketersediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang. Berdasarkan hasil analisis Analytical Hierarchy Process (AHP), maka urutan prioritas strategi yang dihasilkan adalah strategi nomor 1, strategi nomor 2, strategi nomor 7, strategi nomor 6, strategi nomor 4, strategi nomor 5, strategi nomor 8, dan strategi nomor 3. Strategi yang disusun skenario pelaksanaannya adalah strategi yang merupakan prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Hasil prioritisasi strategi ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Prioritisasi Strategi Penyediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang

Tingkat Prioritas	Variabel	Persentase (%)
Prioritas 1	Strategi 1	40.48
Prioritas 2	Strategi 2	22.33
Prioritas 3	Strategi 7	13.10
Prioritas 4	Strategi 6	8.98
Prioritas 5	Strategi 4	5.94
Prioritas 6	Strategi 5	3.94
Prioritas 7	Strategi 8	2.74
Prioritas 8	Strategi 3	2.49

Sumber: Peneliti, 2018

Skenario Penyediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang akan dilakukan dalam 4 (empat) tahap selama 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2020-2024. Penentuan mulai pelaksanaan strategi pada tahun 2020, mempertimbangkan masa peninjauan kembali RTRW Kabupaten Klungkung yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Masa peninjauan kembali RTRW Kabupaten Klungkung dilakukan pada tahun 2019 hingga disahkan oleh legislatif. Sehingga, pelaksanaan strategi layakannya dimulai pada tahun 2020. Strategi nomor 1 dilakukan pada tahun pertama dan tahun kedua. Selanjutnya, strategi nomor 2 dilakukan pada tahun ke dua dan ketiga. Terakhir, strategi nomor 7 dilakukan pada tahun ketiga, keempat dan kelima. Skenario tersebut dituangkan kedalam matrik skenario pelaksanaan strategi penyediaan RTH Kawasan Perkotaan Semarang yang ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Skenario Pelaksanaan Penyediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang Tahun 2020-2024

No	Strategi	Tahun Pelaksanaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemetaan lahan potensial seperti aset-aset pemerintah sebagai alternatif penyediaan RTH Publik					

No	Strategi	Tahun Pelaksanaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Kawasan Perkotaan Semarang (Strategi nomor 1).					
	Pengadaaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Desa/Kelurahan terkait penyediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang (Strategi nomor 2).					
3	Pengoptimalan RTH Sempadan Sungai melalui pengadaan Taman dan konsep wisata sungai berbasis konservasi (Strategi nomor 7).					

Sumber: Peneliti, 2018

D. KESIMPULAN

1. Simpulan

Perumusan strategi penyediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang didahului oleh penentuan posisi kuadran. Optimisme dalam penyediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang disebabkan oleh posisi kuadrannya yaitu berada pada kuadran I. Selanjutnya, optimisme penyediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang dituangkan menjadi 8 (delapan) strategi penyediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang dengan strategi yang memiliki prioritas utama adalah Pemetaan lahan potensial seperti aset-aset milik pemerintah sebagai alternatif penyediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang. Tingkat prioritas strategi digunakan dalam penyusunan Skenario pelaksanaan strategi. Skenario pelaksanaan strategi direncanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024). Strategi nomor 1 dilakukan pada tahun pertama (tahun 2020) dan tahun kedua (2021). Selanjutnya, strategi nomor 2 dilakukan pada tahun kedua (tahun 2021) dan ketiga (tahun 2022). Terakhir, strategi nomor 7 dilakukan pada tahun ketiga (2022), keempat (tahun 2023) dan kelima (tahun 2024).

2. Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu rekomendasi untuk pemerintah dan rekomendasi untuk akademisi (penelitian selanjutnya). Rekomendasi untuk akademisi yaitu melakukan penelitian lanjutan terkait Kajian RTH Privat di Kawasan Perkotaan Semarang. Sedangkan rekomendasi untuk Pemerintah Daerah terkait meliputi:

- a. Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang belum termanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif penyediaan RTH Publik.
- b. Pembebasan lahan untuk memenuhi minimal 20 persen penyediaan RTH Publik.
- c. Memperkuat kerjasama antar instansi pemerintahan maupun pemerintah dengan kelurahan di Kawasan Perkotaan Semarang.

- d. Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan khususnya peruntukan lahan sebagai RTH Publik.
- e. Mengadopsi konsep Green City ke dalam RTRW Kabupaten Klungkung maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan ruang lainnya di Kabupaten Klungkung.
- f. Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan RTH Publik dengan konsep RTH secara vertikal untuk mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan lahan publik di Kawasan Perkotaan Semarang.
- g. Melakukan penelitian lanjutan mengenai Kajian RTH Privat di Kawasan Perkotaan Semarang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung (instansi terkait) yang dalam hal ini memberikan izin dan berkontribusi sebagai informan/responden dalam penelitian ini dan peserta/partisipan FGD mengenai Kajian RTH Publik Kawasan Perkotaan Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, C., 2010. *Kajian Fungsi Ruang Terbuka Hijau Kota pada Berbagai Cluster Ruang di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Asoka, G W N., Aggrey, D M T., Martin, M., Bunyasi, 2013. Effects of Population Growth on Urban Infrastructure and Service: A Case of Eastleigh Neighborhood Nairobi, Kenya. *Journal of Anthropology & Archeology*, 1(1), 41-56. http://jaanet.info/journals/jaa/Vol_1_No_1_June_2013/4.pdf
- Bali, P. D., 2009. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029*. Indonesia: Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
- BPS, 2016. *Kecamatan Klungkung Dalam Angka Tahun 2012-2016*. Klungkung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung.
- Dharmadiatmika, 2017. Konsep Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. *E-Jurnal Arsitektur Lansekap*, 3(2), 213-222.
- Dirjentar, 2008. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*. Indonesia: Departemen Pekerjaan Umum.
- Indonesia, P. R., 2007. *Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007*. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Rangkuti, F., 2000. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Riyadi dan Bratakusumah, 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Saaty, T L., 2008. Decision Making With The Analytic Hierarchy Process. *International Journal Services Sciences*, 1(1).

**Dewa Putu Aris Sadana, Nyoman Utari Vipriyanti, I Putu Sujana, dan I Ketut Widnyana,
Strategi Untuk Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Semarang**

Siahaan, J., 2010. Ruang Publik: Antara Harapan dan Kenyataan. *Buletin Tata Ruang Edisi IV*, pp. 11-16.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Xu, C., Haase, D., & Pauleit, S., 2018. The Impact of Different Urban Dynamics on Green Space Availability: A Multiple Scenario Modeling Approach for The Region of Munich, Germany. *Elsevier*, (93), 1-12.
[doi:https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.04.058](https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.04.058)

Yunus, H., 1999. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.